

DPRD Dorong Optimalisasi Anggaran Disdikbud



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,26/06/2024

- **Dewan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2023**

TANA PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan oleh Bupati Paser dan Ketua DPRD Paser, yang berlangsung di Ruang Paripurna Baling Seloloi, Sekretariat DPRD Paser, Selasa (25//6/2024).

Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi mengatakan dari 5 fraksi yang ada di DPRD Paser telah menyetujui pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun 2023.

“Seluruh fraksi di DPRD Paser sudah menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan jadi Perda,” terang Hendra.

Untuk rincian APBD Paser Tahun 2023 yaitu pendapatan daerah mencapai Rp3,73 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjumlah Rp301,34 miliar, pendapatan transfer Rp3,42 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah Rp6,78 miliar.

“Realisasi belanja daerah capaiannya sebesar Rp4 triliun lebih, angka ini mencapai 88,77 persen atau kurang dari yang direncanakan sebesar Rp4,51 triliun,” tambahnya.

Sementara untuk pembiayaan netto angkanya mencapai Rp951,60 miliar dan terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp676,09 miliar.

Hendra menambahkan, selepas Raperda disetujui maka langkah selanjutnya akan diteruskan untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kaltim.

“Perda APBD Paser Tahun 2023 ini akan kami sampaikan ke Gubernur Kaltim untuk dilakukan evaluasi,” jelasnya. Di samping itu, dalam Rapat Paripurna tersebut seluruh fraksi menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Raperda APBD Paser Tahun 2023.

Salah satunya, kata Hendra DPRD Paser memberi apresiasi atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang 11 kalinya secara berturut-turut oleh Pemkab Paser.

“Tentu kami juga mengapresiasi atas opini WTP yang diraih Pemkab Paser, itu bukan suatu hal yang mudah untuk dicapai yang memerlukan sinergisitas bersama,” papar Hendra.

Selain prestasi, DPRD Paser juga menyoroti tingginya SiLPA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser yang nilainya mencapai Rp202 miliar. Karena itu, DPRD Paser mendorong optimalisasi anggaran di OPD ini.

“Kami menekankan agar proses perencanaan dan penganggaran, khususnya kegiatan fisik sepenuhnya dialokasikan pada APBD murni,” tutup Ketua DPRD Paser.

(Advertorial/syf)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Dorong Optimalisasi Anggaran Disdikbud, 26/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dijelaskan bahwa anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan nonkementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.